

Jual beli tanah yang dilakukan tanpa persetujuan suami dalam hal tidak didaftarkan perjanjian perkawinan (analisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3188 K/PDT/2012) = Buying and selling land without the consent of husband in (case of non registration of the marriage covenant analysis of supreme court of the Republic Indonesia No 3188 K/PDT/2012) / Dea Erizca

Dea Erizca, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433616&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

PPAT mempunyai tugas pokok membuat akta yang berkaitan dengan tanah, salah satunya adalah jual beli. Namun kasus dalam penelitian ini terdapat akta jual beli yang dibuat PPAT yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak terpenuhinya syarat materil dari jual beli. syarat yang dimaksud kali ini mengenai legalitas penjual dimana jual beli tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan suami sementara diantara mereka terdapat suatu perjanjian perkawinan yang belum didaftarkan hingga saat diajukannya perceraian, sehingga dalam perkawinan tersebut berlaku percampuran harta bulat yang berakibat bahwa setiap pengalihan yang dilakukan harus saling memberikan persetujuan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 97 s/d Pasal 100 Per.Men.Agraria/Ka.BPN Nomor 3 tahun 1997 mengenai kewajiban PPAT pada saat persiapan pembuatan akta. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan jual beli yang dilakukan tanpa adanya persetujuan suami dalam hal tidak didaftarkan perjanjian perkawinan dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan nomor.3188 K/PDT/2012 dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain presektif. Tesis ini menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan tanpa adanya persetujuan suami dalam hal tidak didaftarkan perjanjian perkawinan adalah tidak sah; dan terdapat kekeliruan hakim dalam memutus perkara dengan nomor 3188 K/PDT/2012

<hr>

ABSTRACT

PPAT has a fundamental duty to make a deed relating to the land, one of which is the buying and selling. However the cases in this study there is a deed of sale made PPAT contrary to the applicable provisions, namely the non-fulfillment of the terms materially from selling the terms in question this time of the legality of the seller where the purchase was made without their consent husband while between them there is an agreement marriage is not registered until the filing of the divorce, so that the marriage is valid engaging round treasure with the result that any diversion performed must be mutual consent, it is in line with the provisions of Article 97 s /

d Article 100 Per.Men.Agraria / Ka.BPN No. 3 of 1997 concerning the obligation PPAT during the preparation of the deed. As for being in this research is how the validity of the sale and purchase without their husband's consent in the absence of registration of the marriage covenant and How consideration of magistrate judges in deciding the case number 3188 K / PDT / 2012 associated with the applicable regulations. This study is a qualitative research design prescriptive. The thesis concludes that buying and selling is done without their husband's consent in the absence of registration of the marriage agreement is not valid; and there are errors of judges in deciding the case number 3188 K / PDT / 2012.